



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/96/Kpts/BPT- PS/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB  
VERIFIKASI REKOMENDASI PENGANGGARAN DAN REKOMENDASI  
PENCAIRAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa agar tertibnya administrasi terhadap penetapan dan pengendalian belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab verifikasi penganggaran dan rekomendasi pencairan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Perangkat Daerah Sebagai Penanggungjawab Verifikasi Penganggaran dan Rekomendasi Pencairan Belanja Hibah Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab verifikasi rekomendasi penganggaran dan rekomendasi pencairan belanja hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Memverifikasi dokumen-dokumen untuk kelengkapan pencairan belanja hibah sesuai dengan aturan Perundang-undangan, sebelum disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. Memberikan rekomendasi pencairan dana yang disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 13 Februari 2019

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**HENDRAJONI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ **96** /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : **13** FEBRUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENAGGUNG  
JAWAB VERIFIKASI REKOMENDA PENGANGGARAN DAN  
REKOMENDASI PENCAIRAN BELANJA HIBAH YANG BERSUM-  
BER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                                                           | BELANJA HIBAH YANG DIVERIFIKASI<br>DAN YANG DIREKOMENDASIKAN<br>TAHUN 2019                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dinas Pariwisata, Pemuda dan<br>Olah Raga,<br>Kabupaten Pesisir Selatan                    | Hibah daerah yang berhubungan dengan<br>Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda<br>dan Olah Raga |
| 2.  | Dinas Kesehatan Kabupaten<br>Pesisir Selatan                                               | Hibah daerah yang berhubungan dengan<br>bencana, bantuan resiko sosial lainnya               |
| 3.  | Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan          | Hibah daerah yang berhubungan dengan<br>Kesejahteraan Sosial, dan Agama                      |
| 4.  | Bagian Kesatuan Bangsa dan<br>Politik Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan      | Hibah daerah yang berhubungan dengan<br>Instansi Vertikal dan Organisasi Massa<br>(Ormas )   |
| 5.  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kabupaten Pesisir Selatan                               | Hibah daerah yang berhubungan dengan<br>pendidikan                                           |
| 7.  | Dinas Koperasi UMKM<br>Perdagangan dan Perindustrian                                       | Hibah daerah yang berhubungan dengan<br>Koperasi                                             |
| 8.  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat<br>dan Desa, Pengendalian Penduduk<br>dan Keluarga Berencana | Hibah daerah yang berhubungan dengan<br>Adat istiadat                                        |

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**HENDRAJONI**